

**PROBLEMATIKA ITSBAT NIKAH TERPADU MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA**

T E S I S

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M. H.)
Program Studi Hukum Islam**



OLEH:

**ACU AHMAD MUZAKI
NIM : 19086040009**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2021**

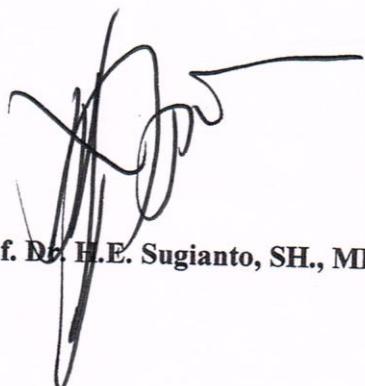
LEMBAR PERESETUJUAN

PROBLEMATIKA ITSBAT NIKAH TERPADU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Disusun oleh :
ACU AHMAD MUZAKI
NIM : 19086040009

Telah Disetujui pada tanggal

Pembimbing I,



Prof. Dr. H.E. Sugianto, SH., MH.

Pembimbing II,



Dr. K.H. Syamsudin, M. Ag.

LEMBAR PERESETUJUAN
PROBLEMATIKA ITSBAT NIKAH TERPADU MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Disusun oleh :
ACU AHMAD MUZAKI
NIM : 19086040009

Telah Disahkan Pada Tanggal 26 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M. H).

Ketua Anggota

Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M. Ag.
Nip. 19590320 198403 1 002

Sekretaris Anggota

H. Didin Nurul Rosyidin, M.A., Ph. D.
Nip. 19730404 199803 1 005

Pembimbing I,

Prof. Dr. H.E Sugianto, SH., MH.
Nip. 19670218 200501 1 002

Pembimbing II,

Dr. K.H. Syamsudin, M. Ag.
Nip. 19610328 199303 1 003

Pengaji Utama

Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag.
Nip. 19750601 200501 1 008

Direktur,

Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M. Ag.
Nip. 19590320 198403 1 002

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada;

- 1) Isteri-Ku (Eva Saftri, SH.) dan Anak-anak-ku tercinta (Fachrezy Aditya Pratama & Dhifa Bahira Hakim) yang selalu setia mendampingi dalam suka dan duka;
- 2) Kedua orang tuaku, Kakak dan Adik-ku yang senantiasa memotifasi dalam berkarya;
- 3) Saudara-saudaraku rekan-rekan seperjuangan yang saya sayangi & saya banggakan;
- 4) Sahabat-sahabat setia-ku di Pengadilan Agama Majalengka yang saya cintai ;
- 5) Almamater-ku Konsentrasi Magister Hukum Keluarga Islam. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang dibanggakan;

Terimakasih atas dukungan dan motifasinya selama ini

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Acu Ahmad Muzaki
NIM : 19086040009
Jenjang Proram : Magister S2
Program Studi : Hukum Keluarga Islam / AS
Pada Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati
Cirebon

Menyatakan bahwa tesis/disertasi ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini di buat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati disertai kesiapan untuk bertanggungjawab atas segala resiko yang mungkin diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 19-6-2021

Yang menyatakan,



Acu Ahmad Muzaki

Nim. 19086040009

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrop terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha

ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberitanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ء).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	Fathah	A	A
=	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـ و	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah (t). Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat suku transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya dengan (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ۚ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ﷺ ber-tasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـ) maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ی (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak

di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz al-Jalalah (ﷺ)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilah (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz aljalalah, ditransliterasi dengan huruf (t).

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, Sang pencipta langit dan bumi serta segala isinya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam penyusun panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentera bagi hati manusia, Nabi yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh pengetahuan yang luar biasa seperti sekarang ini.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum serta sebagai sumbangan secara teoritis maupun praktis dalam penyelesaian perkara isbat nikah terpadu. Dengan ini penyusun menyadari bahwa penyusunan tesis ini, tidak akan tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam momentum ini dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat;

1. Bapak Prof Dr. H. Dedi Djubaedi, M. Ag. Selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Prof Dr. H. E. Sugianto, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama perkuliahan. Para Pembantu Rektor dan Seluruh Jajaran Civitas Akademik Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto, SH., MH. Selaku Pembimbing I dan Dr. KH. Syamsudin, M. Ag. Sebagai pembimbing II dalam Penyusunan tesis ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang sangat berjasa kepada penyusun selama kuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Wakil Sekretaris, Bapak Hakim dan Ibu Hakim serta Pegawai Pengadilan Agama Majalengka yang telah membantu dan menjadi nara sumber dalam penyusunan tesis ini.
6. Semua pihak yang memberikan kontribusi dalam penyusunan tesis ini, trimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Semoga amal dan budi baik mereka mendapat balasan yang berlipat ganda. Dan semoga menjadi insane kamil yang dicintai oleh Allah SWT di dunia dan akherat.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT mudah-mudahan tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.



RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Majalengka pada tanggal 20 Januari 1979 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H. M. Nadjmudin dan Ibu Hajah Juhriyah yang bertempat tinggal di Jln. Rasamala No. 77 A. Rt.013 Rw.004 Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri di Majalengka mendapat Ijazah tahun 1980, dilanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN 4) Majalengka mendapatkan Ijazah tahun 1993, Menempuh Madrasah Aliyah Negeri (MAN I) Majalengka mendapatkan Ijazah tahun 1996, Kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunung Djati Bandung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (AS) Program S.1 mendapatkan Ijazah tahun 2000 dan Sekarang menempuh kuliah Program Pascasarjana Magister Hukum Keluarga Islam di Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sekarang penulis bekerja dan berkarya di Intansi Mahkamah Agung RI. C.q Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1 A sampai dengan sekarang.

Cirebon, Agustus 2021

Penulis

A B S T R A K

Isbat nikah terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan terkordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, KUA dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan. Isbat nikah terpadu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. Sekalipun dasar hukum pelaksanaan Isbat nikah terpadu tersebut dipayungi oleh Perma, namun fungsinya tetap sama yaitu fungsi pengaturan atau *regelende functie* bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Latar belakang lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2015 karena tingginya angka perkawinan yang tidak dicatat disebabkan lemahnya akses masyarakat tidak mampu ke pengadilan. Tujuan diberlakukan isbat nikah terpadu adalah untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum dan membantu masyarakat dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya riangan.

Permasalahan yang dihadapi saat ini masih terdapat masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan alasan tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang tidak memiliki akta nikah bisa diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama (PA). masih terdapatnya beberapa pasangan yang menikah tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama. Dalam penelitian ini penulis akan membahas (Problematika itsbat nikah terpadu menurut hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Majalengka) Apakah yang melatarbelakangi hakim dalam memutus itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Majalengka? Bagaimana itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif? Apakah implikasi itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama pada Perkawinan?

Penelitian ini merupakan kualitatif *naturalistic inquiry*, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar'i dan pendekatan yuridis, yaitu melihat atau memandang sesuatu dari aspek atau segi hukumnya baik hukum Islam dan hukum berdasarkan undang-undang. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Interview dan Dokumentasi. Interview ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancara para informan, wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Majalengka. Kemudian Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari dokumen-dokumen signifikan yang berkaitan dengan Itsbat Nikah, seperti buku register perkara Itsbat Nikah/putusan pengadilan, laporan tahunan, dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara isbat nikah terpadu yang dikabulkan oleh hakim adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah serta dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan (UUP). Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UUP tidak bisa dikabulkan karena di khawatirkan pernikahan sirri akan tumbuh secara massif apabila isbat nikah terhadap perkawinan setelah UUP dikabulkan. Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap isbat nikah setelah berlakunya UUP yakni berdasarkan pasal 7 ayat (3) (a) Kompilasi Hukum Islam yakni isbat nikah dapat diajukan di Pengadilan berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan, keperluan anak untuk mendapatkan akta lahir, keperluan untuk ke Taspen, keperluan untuk mengurus paspor pemberangkatan ibadah haji.

Kata kunci: *isbat nikah terpadu; pengadilan agama; kompilasi hukum islam; identitas hukum.*

A B S T R A C T

Integrated marriage isbat is a series of activities that are carried out together and coordinated at a certain time and place between the Religious Courts/Syar'iyyah Courts, the Regency/City Population and Civil Registration Offices, KUA in mobile services to provide marriage ratification services. The integrated marriage isbat is carried out based on the Supreme Court Regulation Number 1 of 2015. Even though the legal basis for the implementation of the integrated marriage isbat is under the umbrella of the Supreme Court, its function remains the same, namely the regulatory function or regelende function for the smooth administration of justice. The background of the birth of Perma Number 1 of 2015 is because the high number of marriages that are not recorded is due to the weak access of the poor to the courts. The purpose of implementing an integrated marriage isbat is to increase access to legal services and assist the community in obtaining rights to marriage certificates, marriage books and birth certificates which are carried out simply, quickly and at low cost.

The problem faced today still there are people who are not registering marriages due to certain reasons. To overcome this, as in article 7, paragraph (2) Compilation of Islamic Law, a marriage that did not have a marriage certificate can be submitted isbat marriage in the Religious Court. still several couples who not register marriage its in the Office of Religious Affairs. In this study the authors will observation (the problem of integrated marriage itsbat according to Islamic law and positive law in the Majalengka Religious Court) What is the background of the judge in deciding the integrated marriage itsbat at the Majalengka Religious Court? How is the integrated marriage itsbat in the Religious Courts in accordance with Islamic law and positive law? What are the implications of integrated marriage itsbat in the Religious Courts on Marriage?

This research is a qualitative naturalistic inquiry, in which researchers go directly to the field to obtain complete data. The approach used is the syar'i approach and the juridical approach, namely seeing or viewing something from its legal aspects or aspects, both Islamic law and law based on law. While the data collection techniques used are Interview and Documentation. This interview was conducted to obtain information by interviewing informants, interviews were conducted with the judges of the Majalengka Religious Court. Then Documentation is the collection of data from significant documents related to Its bāt Nikah, such as the register of cases of Is bāt Nikah/court decisions, annual reports, and so on.

The research results indicate that the case of isbat marriage granted by the judge is marriage which qualified and principle marriage so implemented before enactment of the Marriage Act (UUP). While marriage implemented after enactment of the Marriage Act (UUP) could not be granted because apprehensive in Sirri marriage will grow massively if isbat marriage to marriage after UUP granted. However, there are exceptions to isbat marriage after enactment of the UUP which is based on article 7, paragraph (3) (a) Compilation of Islamic law that is isbat marriage can be submitted in the Court in respect with existing marriage in the context of the completion of a marriage, the need of children to obtain birth certificates, the need for to TASPEN, the need for take care of a passport departure pilgrimage..

Keywords: *integrated marriage isbat; religious court; compilation of Islamic law; legal identity.*

نبذة مختصرة

إبساط الزواج المتكامل عبارة عن سلسلة من الأنشطة التي يتم تنفيذها معًا وتنسيقها في وقت ومكان معينين بين المحاكم الدينية / المحاكم السورية ، ومكاتب التسجيل المدني / سكان المدينة ، وجامعة الكويت في الخدمات المتنقلة لتقديم خدمات التصديق على الزواج . يتم إجراء الزواج المتكامل بناءً على لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2015 على الرغم من أن الأساس القانوني لتنفيذ أسبة الزواج المتكامل يقع تحت مظلة المحكمة العليا ، إلا أن الوظيفة تظل كما هي ، وهي الوظيفة التنظيمية أو regelende functie من أجل الإدارة السلسة للعدالة. ترجعخلفية ولادة بيرما رقم 1 لعام 2015 إلى ارتفاع عدد الزيجات التي لم يتم تسجيلها بسبب ضعف وصول القراء إلى المحاكم. والغرض من تنفيذ نظام إبساط الزواج المتكامل هو زيادة الوصول إلى الخدمات القانونية ومساعدة المجتمع في الحصول على حقوق شهادات الزواج وكتب الزواج وشهادات الميلاد التي تتم ببساطة وبسرعة وبتكلفة منخفضة.

المشكلة التي نواجهها اليوم هي أنه لا يزال هناك أشخاص لا يسجلون زيجاتهم لأسباب معينة. للتغلب على هذا ، كما هو مذكور في المادة 7 الفقرة (2) من مجموعة الشريعة الإسلامية ، يمكن تقديم الزيجات التي لا تحمل شهادة زواج لزواج العسبة في المحاكم الدينية (PA). لا يزال هناك بعض المتزوجين الذين لم يسجلوها في مكتب الشؤون الدينية. في هذه الدراسة سيناقش المؤلف (مشكلة الزواج المتكامل وفق الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في محكمة Majalengka الدينية) ما هي خلفية القاضي في البت في الزواج المتكامل في محكمة Majalengka الدينية؟ كيف يتم دمج الزواج في المحاكم الشرعية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؟ ما هي انعكاسات تداخل الزواج في المحاكم الشرعية على الزواج؟

هذا البحث هو استقصاء نوعي طبيعي ، حيث يذهب الباحثون مباشرة إلى الميدان للحصول على بيانات كاملة. النهج المستخدم هو النهج الشيعي والنهج الفقهي ، أي رؤية أو رؤية شيء ما من جوانبه أو جوانبه القانونية ، سواء الشريعة الإسلامية أو القانون القائم على القانون. بينما تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المقابلة والتوثيق. أجريت هذه المقابلة للحصول على معلومات من خلال مقابلة المخبرين ، وأجريت المقابلات مع قضاة محكمة Majalengka الدينية. ثم التوثيق هو جمع البيانات من الوثائق المهمة المتعلقة بـ Its bāt Nikah ، مثل سجل قضايا Is bt Nikah / قرارات المحكمة ، والتقارير السنوية ، وما إلى ذلك.

وأظهرت النتائج أن قضية إبساط الزواج المتكاملة التي منحها القاضي كانت زواجاً استوفى متطلبات وأركان الزواج وتم تنفيذه قبل سن قانون الزواج. وفي الوقت نفسه ، لا يمكن منح الزيجات التي تعقد بعد تشريع UUP لأنها يُخشى أن ينمو زواج سري بشكل كبير إذا كان الزواج ضد الزيجات بعد منح UUP. ومع ذلك ، هناك استثناءات من عقد الزواج بعد تشريع UUUP ، أي استناداً إلى المادة 7 الفقرة (3) (أ) تجميع الشريعة الإسلامية ، أي أن الزواج يمكن رفعه في المحكمة فيما يتعلق بوجود الزواج في سياق إتمام الزواج ، ضرورة حصول الأبناء على شهادة ميلاد ، الحاجة لشهادات الزواج ، Taspen ، ضرورة ترتيب جواز سفر لمعادرة الحج.

الكلمات المفتاحية : إبساط الزواج المتكامل . المحاكم الدينية تجميع الشريعة الإسلامية . الهوية القانونية .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSEMBAHAN i

HALAMAN PERNYATAAN ii

PEDOMAN TRANSLITERASI iii

KATA PENGANTAR ix

RIWAYAT HIDUP ix

ABSTRAK x

ABSTRAK ENGLISH xii

ABSTRAK ARAB xii

DAFTAR ISI xiii

BAB I PEDAHLUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	15
D. Penelitian Terdahulu	16
E. Kegunaan Penelitian	20
F. Kerangka Pemikiran	21
G. Metode Penelitian	34
H. Sistematika Penulisan	46

BAB II TINJUAN TEORITIS TENTANG ITSBAT NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Definisi Itsbat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	48
---	----

B. Ketentuan Itsbat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	65
--	----

1. Konsep dan Tujuan Istbat Nikah Dalam Hukum Islam	65
2. Ketentuan Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif ...	75

C. Itsbat Nikah dan Masalah-Masalah Yang Memerlukan Itsbat Nikah	82
--	----

BAB III STUDY EMPIRIK TENTANG ITSBAT NIKAH TERPADU DI PERADILAN AGAMA MAJALENGKA

A. Latar Belakang Dan Tujuan Itsbat Nikah Terpadu	97
---	----

B. Profil Pengadilan Agama Majalengka	127
---	-----

C. Perkara Itsbat Nikah dan Ketentuan Hukum di Pengadilan Agama Majalengka	142
--	-----

BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA ITSBAT NIKAH TERPADU BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

A. Konsep dan Tujuan Isbat Nikah Terpadu Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif	196
--	-----

B. Analisis Aplikasi Itsbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Majalengka	202
--	-----

C. Implikasi Istbat Nikah di Pengadilan Agama Majalengka	233
--	-----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	241
---------------------	-----

B. Saran	242
DAFTAR PUSTAKA	243

